



TAHUN 2022

# RENCANA KERJA BP2SDM

Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : SK. 20 /P2SDM/SET.11/KEU.0/11/2021**

**TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan khususnya terkait penyuluhan dan pengembangan SDM LHK perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
  13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahn, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505).
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
21. Keputusan Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri LHK No. SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2020 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;

23. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2022.

KESATU : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan P2SDM ini.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2022 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2022 ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

- KEEMPAT** : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ini merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2022, dan di jadikan sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 November 2021

KEPALA BADAN,

HESMI BASALAMAH, M.M.

NIP. 19611119 198802 1 001



## PENGANTAR KEPALA BADAN P2SDM

Penyusunan Rencana Kerja BP2SDM tahun 2022 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pada Tahun 2022 fokus Pemerintah yang juga dituangkan sebagai tema dalam penyusunan RKP 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Pada Tahun 2021, terdapat kebijakan baru terkait perubahan organisasi pada Kementerian LHK yang tercantum melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021. Perubahan ini mengakibatkan perlu adanya penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK, termasuk Badan P2SDM. Badan P2SDM seperti tahun 2021, masih masuk ke dalam tiga program yaitu “Program Dukungan Manajemen”; “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” dan “Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi” namun terdapat perubahan rincian kegiatan yang masuk ke dalam masing-masing program.

Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 bagi Satuan Kerja di lingkup Badan P2SDM. Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2022. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal, jujur, integritas, etos kerja, dan gotong royong.





---

# DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kepala Badan P2SDM.....	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3 Struktur Organisasi Badan P2SDM .....	3
1.4 Sumber Daya Manusia pada Badan P2SDM .....	5
1.5 Pengarusutamaan .....	6
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 .....	8
2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Target Tahun 2021 .....	8
2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 .....	13
III. Rencana Kerja Tahun 2022 .....	18
3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 .....	18
3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	20
3.3 Alokasi Pendanaan Badan P2SDM Tahun 2022 .....	28
IV. Penutup .....	30
V. Lampiran .....	31

---

# DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM .....	4
TABEL 2. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2020 .....	10
TABEL 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2021 .....	11
TABEL 4. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2021 .....	12
TABEL 5. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM .....	14
TABEL 6. REALISASI ANGGARAN BP2SDM TA 2020 .....	14
TABEL 7. PROGNOSES REALISASI ANGGARAN BP2SDM TA 2021 .....	17
TABEL 8. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 1 .....	19
TABEL 9. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 3 .....	19
TABEL 10. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022 .....	20
TABEL 11. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2022 ....	22
TABEL 12. RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN LINGKUP BADAN P2SDM .....	27
TABEL 13. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM .....	29

---

# DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1. AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL .....	1
GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM .....	3
GAMBAR 3. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM .....	5
GAMBAR 4. INDIKATOR KINERJA PROGRAM BADAN P2SDM TAHUN 2020 .....	9
GAMBAR 5. POSTUR ANGGARAN BP2SDM TA 2021 .....	15
GAMBAR 6. REALISASI ANGGARAN PER BELANJA DAN SATKER BP2SDM TA 2021 s.d 8 NOVEMBER 2021 .....	16
GAMBAR 7. PROGRAM KEMENTERIAN LHK .....	21
GAMBAR 8. DANAU DI KHDTK BUKIT SULIGI (PEKANBARU) .....	23
GAMBAR 9. ASRAMA DI SMKKN PEKANBARU .....	24
GAMBAR 10. KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN KTH DAN WANAWIYATA WIDYAKARYA (LP2UKS) .....	25
GAMBAR 11. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2022 .....	29

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2022 Pemerintah masih berfokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan dampak pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19) yang muncul sejak awal pelaksanaan tahun 2020. Fokus Pemerintah tersebut sebagaimana tertuang pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pandemi ini mengakibatkan dampak yang cukup besar di masyarakat khususnya dari segi ekonomi, namun dengan berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah sampai dengan Tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai mengalami peningkatan. Oleh sebab itu Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan fokus utama pemulihan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional dimana 4 (empat) diantaranya terkait dengan Kementerian LHK. Prioritas Nasional ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Nasional (ProPN), dan Proyek Kementerian LHK yang dijabarkan pada Rincian Output Kegiatan dalam Rencana Kerja. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian LHK dan tujuan kerja Pemerintah tahun 2022, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu pada PN1, PN3 dan PN6 melalui 11 (sebelas) kegiatan.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021  
(tercantum dalam Dokumen RKP 2022)

GAMBAR 1. AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2SDM, fokus utama kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM adalah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia LHK. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022, Pemerintah juga telah menetapkan 45 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2022. Berbeda dengan tahun 2021 dimana BP2SDM mendukung pada Major Project 17 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 melalui 2 (dua) kegiatan yaitu penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat serta pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha. Pada tahun 2022 BP2SDM mendukung *Major Project* 44-Pengelolaan Terpadu UMKM melalui kegiatan “Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha”. Perubahan tersebut berdasarkan hasil arahan dari Kementerian PPN/Bappenas dimana MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 pada tahun 2022 hanya fokus pada 6 subsektor yaitu makanan/minuman, alat kesehatan, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia.

Dengan mengacu pada visi misi Presiden RI dan rumusan visi misi Kementerian LHK, sesuai Renstra Badan P2SDM tahun 2020-2024 telah dirumuskan visi dan misi serta beberapa langkah kebijakan strategis untuk mewujudkannya. Secara umum, langkah strategis yang dilakukan oleh BP2SDM antara lain melalui peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan dalam mendukung program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta vokasi; Revitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan serta pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan; Pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing; Pengembangan lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas); Pengembangan SDM yang berorientasi Wirausaha Kreatif di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pengembangan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan hidup pada lembaga/komunitas masyarakat maupun sekolah; serta Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan SDM LHK semakin berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah dirumuskan, tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah “**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan**”. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2022 ini merupakan penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2022 dan rencana strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 yang berisi rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

## 1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Badan P2SDM mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan serta memiliki fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II yaitu Sekretariat Badan; Pusat Penyuluhan; Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau secara bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan P2SDM selain didukung oleh 5 unit eselon II juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM

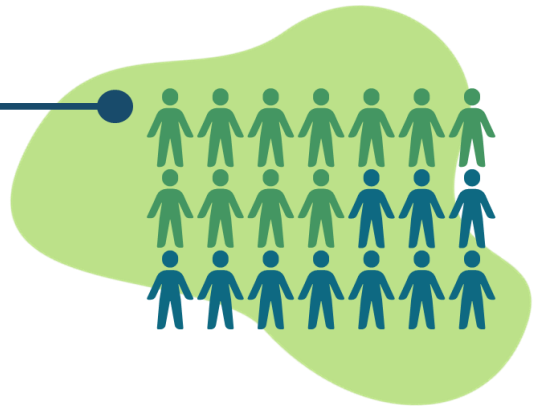
No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
<b>A. Unit Kerja Eselon II (Pusat)</b>			
1.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Pengembangan Generasi LHK	Serpong	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia
<b>B. UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</b>			
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
<b>C. SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</b>			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

## 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN P2SDM

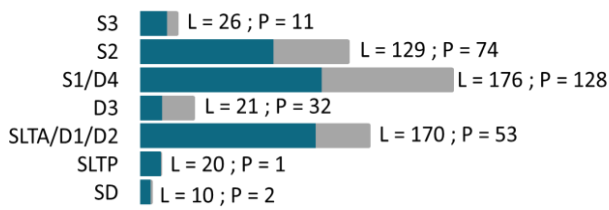
Pelaksanaan kegiatan pada Badan P2SDM didukung oleh SDM yang berasal dari unsur pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak). Pada tahun 2021 (November) terdapat 1.208 orang pegawai yang tersebar pada unit kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM.

### TOTAL SDM BP2SDM

SDM BP2SDM sebanyak 1.208 Orang (855 ASN dan 353 orang tenaga PPNPN) yang tersebar pada Unit Kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM



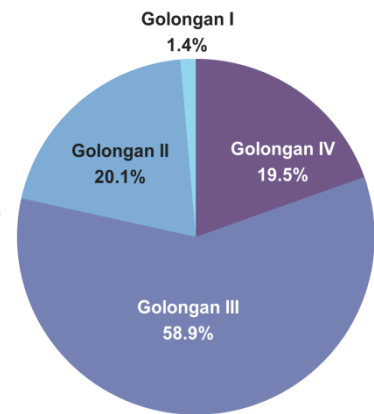
### ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



### ASN Berdasarkan Golongan

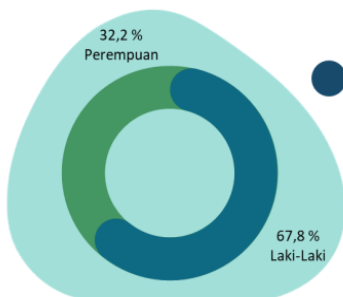
Berdasarkan Golongan, ASN BP2SDM terdiri dari:

- 167 Golongan IV (116 Laki-Laki; 50 Perempuan)
- 504 Golongan III (297 Laki-Laki; 207 Perempuan)
- 172 Golongan II (129 Laki-Laki; 43 Perempuan)
- 12 Golongan I (11 Laki-Laki; 1 Perempuan)



### Data Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah Pegawai BP2SDM, terdiri dari 821 Laki-Laki (211 Pusat; 430 UPT) dan 387 Perempuan (145 Pusat; 242 UPT)



GAMBAR 3. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM



## 1.5 PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

### 1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarustamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

### 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini

Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

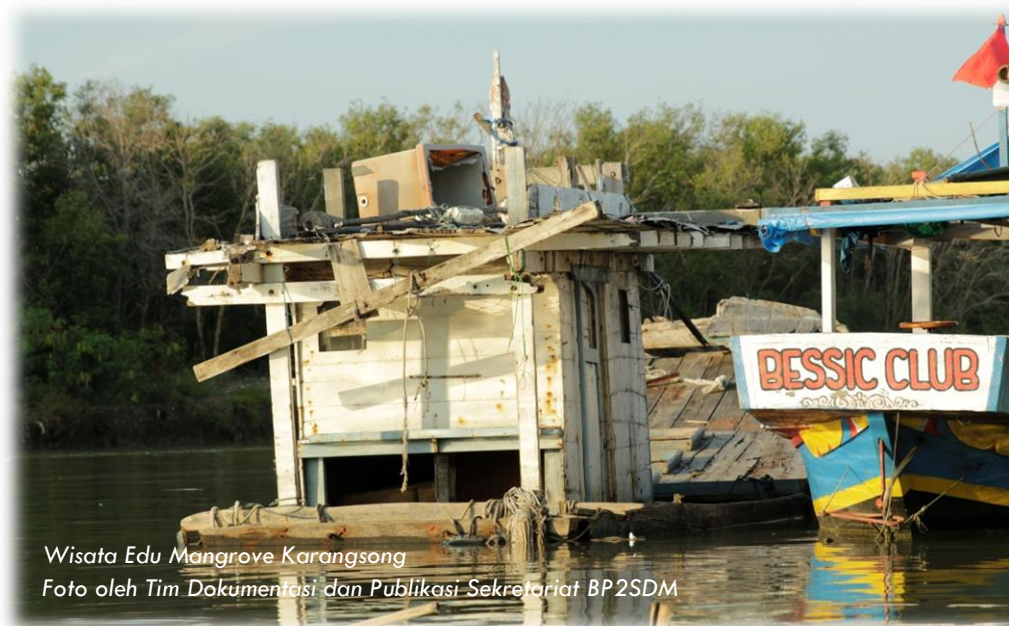
### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Sistem Informasi Pendamping (SIMPING), serta *Learning Management System (LMS) E-Learning*.



Wisata Edu Mangrove Karangsong  
Foto oleh Tim Dokumentasi dan Publikasi Sekretariat BP2SDM

## II. Capaian Sasaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021

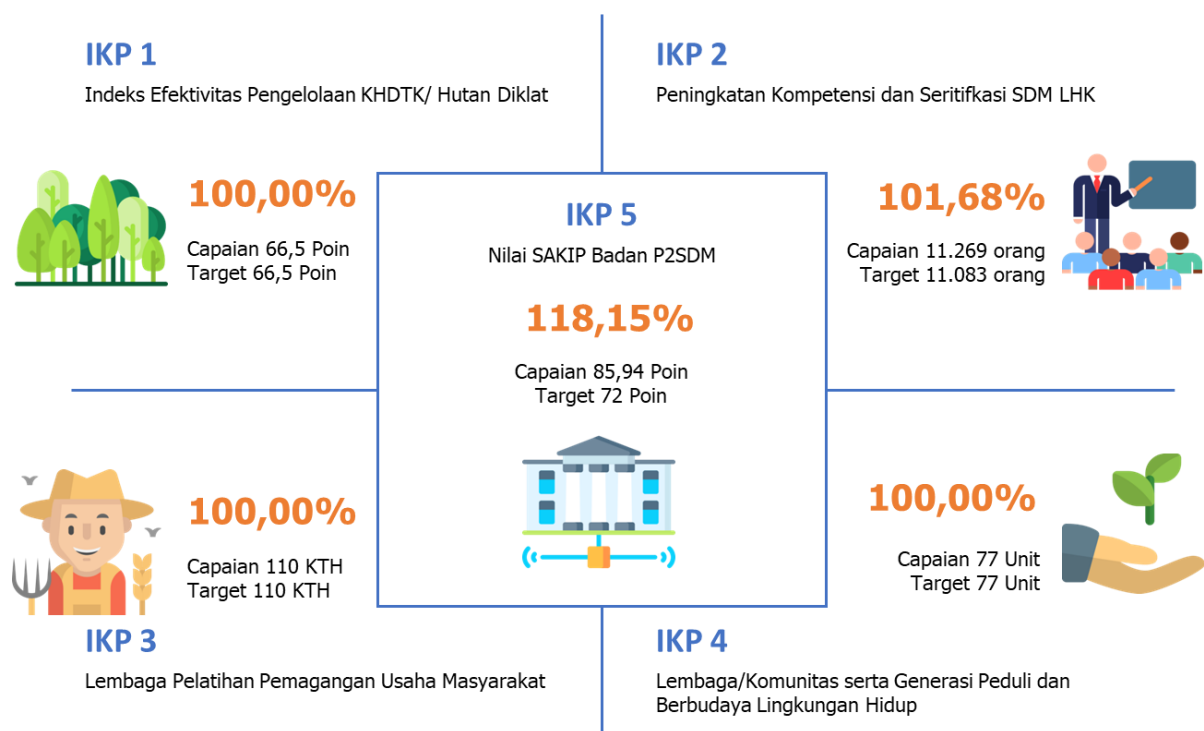
### 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

#### 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Program Badan P2SDM pada tahun 2020 adalah Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 5 (lima) indikator kinerja program dan 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan. Akibat terjadinya pandemi Covid-19 di dunia termasuk Indonesia, terjadi perubahan postur anggaran pada Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian LHK. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden no.54 Tahun 2020 serta Memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE.6/MK.02/2020 perihal *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri LHK Nomor SE.9/SETJEN/ROCAN/SET.1/3/2020 tanggal 28 Maret 2020, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Selain itu, dilakukan pemotongan anggaran, khususnya perjalanan dinas dan paket *meeting* yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi ini sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanganan COVID-19.

*Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan pada Kementerian LHK, mengakibatkan beberapa perubahan kebijakan kegiatan dan target kinerja pada Badan P2SDM. Perubahan yang signifikan terjadi pada pelaksanaan diklat serta pelatihan masyarakat serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tatap muka. Untuk menghindari penyebaran Covid-19. Pelaksanaan diklat dan pelatihan masyarakat dilakukan menggunakan metode jarak jauh (*e-learning*). Perubahan metode ini mengakibatkan berubahnya target pada kegiatan diklat aparatur dan non aparatur.

Untuk menghadapi dampak pandemi pada ekonomi masyarakat, jenis diklat yang dilakukan adalah dengan menambah diklat pendamping perhutanan sosial. Diklat ini bertujuan untuk melatih pendamping penerima ijin perhutanan sosial agar dapat menjadi lebih produktif di kondisi pandemi saat ini. Selain kegiatan diklat, kegiatan lain juga dilakukan dengan mengurangi kegiatan secara tatap muka. Secara rinci target kegiatan pada Badan P2SDM setelah adanya kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : LKj Badan P2SDM 2020

**\* Keterangan:**

1. IKP SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya; SDM yang mengikuti Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK; serta lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2. IKP Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat dihitung berdasarkan Jumlah KTH Mandiri dan Pembentukan LP2UKS.

Gambar 4. INDIKATOR KINERJA PROGRAM BADAN P2SDM TAHUN 2020

Untuk mencapai target pada IKP dan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

- Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
- Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- Peningkatan Penyuluhan;
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui 14 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 2 berikut.

TABEL 2. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2020

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi Tahun 2020
<b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b> Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	1. Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
	2. Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
	3. SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya, 1.000 orang	1.022 Orang
<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK</b> Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 9.617 Orang	9.781 Orang
	2. SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa, 23 orang	17 Orang
	3. Nilai KHDTK yang dikelola, 66,5 poin	66,5 Poin
<b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b> Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang tersedia, 466 orang	466 Orang
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</b> Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	1. SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari, 1.530 orang	1.540 Orang
	2. Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan, 5 unit	5 Unit
	3. Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 72 Unit	72 Unit
<b>Peningkatan Penyuluhan</b> Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	2. Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat, 200 orang	460 Orang
	3. Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri, 120 KTH	120 KTH
	4. Pengembangan dan Implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan, 3 Jenis	3 Jenis
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b> Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, SAKIP dengan nilai 72 poin	85,07 Poin

### 2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 (s.d. November 2021)

Pada Tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait restrukturisasi/redesain Program pada Kementerian LHK. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S.375/MK.02/2020 dan Nomor B.308/M.PPN/D/PP.04.03/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal daftar Program Kementerian/Lembaga, Program Kementerian LHK mulai Tahun 2021 mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program. Kebijakan ini juga menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Badan P2SDM yang sebelumnya termasuk ke dalam satu program yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima serta Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan program di Badan P2SDM, disusun indikator kinerja program dan kegiatan. Target yang terdapat pada indikator kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh Badan P2SDM. Rincian besaran target IKP Badan P2SDM serta realisasi s.d November Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

TABEL 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Realisasi	%
01- Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (Poin)	67 Poin	0	0,00%
02- Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Sertifikasi Kompetensi SDM LHK (orang)	1.000 Orang	1.020 Orang	102,00%
	Peningkatan Kompetensi SDM LHK (orang)	3.222 Orang	3.219 Orang	99,91%
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat (Unit)	103 Unit	103 Unit	100,00%
	Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (unit)	260 Unit	260 Unit	100,00%

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Realisasi	%
03- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Poin)	74 Poin	80,82 Poin	109,22%

Untuk mencapai target pada IKP tersebut sesuai dengan kebijakan baru pada tahun 2020, penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021 telah mengikuti dan menyesuaikan dengan klasifikasi rincian output yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan resmi dan mengikuti pedoman penentuan rincian output, rencana kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2021 seperti tercantum pada tabel 8 berikut.

TABEL 4. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2021

No	Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan P2SDM	74 Poin	80,82 Poin	109,22%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100,00%
		Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	1	1	100,00%
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1	1	100,00%
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1	0	0,00%
		Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	1.000 Orang	1.020 Orang	102,00%
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	1.618 Orang	1.623 Orang	100,31%
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.744 Orang	2744 Orang	100,00%
		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35 Orang	21 Orang	60,00%
		Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	1.338 Orang	1.338 Orang	100,00%
		Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	0	0,00%

No	Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	478 Orang	475 Orang	99,37%
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	260 Lembaga	260 Lembaga	100,00%
		SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	945 Orang	947 Orang	100,21%
6	Peningkatan Penyuluhan	KTH Mandiri yang terbentuk	65 Unit	65 Unit	100,00%
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	38 Unit	38 Unit	100,00%
		Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.030 Orang	1.258 Orang	122,14%

## 2.2 CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

### 2.2.1 Serapan Anggaran Tahun 2020

Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada awal tahun pelaksanaan 2020 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp341.386.089.000,-. Pada Tahun 2020 terjadi *Refocusing* dalam rangka penanganan pandemi covid-19, dimana anggaran Badan P2SDM mengalami penurunan menjadi Rp276.286.386.000,-. Setelah adanya *refocusing*, terdapat kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi di Masyarakat. Badan P2SDM mendapat alokasi tambahan sebesar Rp8.930.000.000,- sehingga pagu BP2SDM menjadi **Rp285.216.386.000,-**.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan pada satker Pusdiklat SDM LHK untuk pelaksanaan dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu Nasional (*Food Estate*) sebesar Rp6.260.000.000,- berupa Pelatihan Agroforestry 94 angkatan @30 orang sebesar Rp6.110.000.000,- dan Pelatihan bagi Pendamping 94 orang (3 angkatan) sebesar Rp150.000.000,-; serta pada satker Pusat Penyuluhan untuk mendukung kegiatan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu Nasional (*Food Estate*) sebesar Rp2.670.000.000,- berupa Pendampingan bagi Kelompok Tani Perhutanan Sosial dan Agroforestry.



Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

TABEL 5. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

NO.	SATUAN KERJA	PAGU AWAL (RP)	PAGU AKHIR (RP)
<b>1. Unit Kerja Pusat</b>			
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	71.291.095.000	57.400.454.000
a	<i>Sekretariat Badan P2SDM</i>	38.894.570.000	28.709.485.000
b	<i>Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM</i>	8.740.000.000	6.192.411.000
c	<i>Pusat Penyuluhan</i>	23.656.525.000	22.498.558.000
4	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	17.531.700.000	11.663.375.000
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	45.070.484.000	40.469.312.000
<b>2. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>			
6	BDLHK Pematangsiantar	12.846.640.000	11.353.440.000
7	BDLHK Pekanbaru	14.543.500.000	13.120.300.000
8	BDLHK Bogor	15.827.580.000	14.243.380.000
9	BDLHK Kadipaten	14.544.040.000	13.650.840.000
10	BDLHK Samarinda	13.180.500.000	11.603.050.000
11	BDLHK Makassar	16.475.000.000	14.637.800.000
12	BDLHK Kupang	13.925.900.000	12.986.785.000
<b>3. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>			
13	SMKKN Pekanbaru	32.131.650.000	26.846.650.000
14	SMKKN Kadipaten	20.525.000.000	15.025.000.000
15	SMKKN Samarinda	18.640.000.000	15.513.000.000
16	SMKKN Makassar	19.553.000.000	14.053.000.000
17	SMKKN Manokwari	15.300.000.000	12.650.000.000
<b>TOTAL BP2SDM</b>		<b>341.386.089.000</b>	<b>285.216.386.000</b>

Serapan anggaran BP2SDM Tahun 2020 adalah 92,56% atau Rp264.000.609.643,- dengan rincian per satker sebagaimana tabel 6 berikut.

TABEL 6. REALISASI ANGGARAN BP2SDM TA 2020

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi Tahun 2020	
			Rupiah	%
	<b>Badan P2SDM</b>	<b>285.216.386.000</b>	<b>264.000.609.643</b>	<b>92,56</b>
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	57.400.454.000	51.043.161.198	88,92
a	<i>Sekretariat BP2SDM</i>	28.709.485.000	22.396.715.216	78,01
b	<i>Pusat Penyuluhan</i>	22.498.558.000	22.464.101.256	99,85
c	<i>Pusat Renbang SDM</i>	6.192.411.000	6.182.344.726	99,84
2	Pusdiklat SDM LHK	40.469.312.000	39.618.323.396	97,90
3	Puslatmas dan PGL	11.663.375.000	11.318.671.944	97,04
4	BDLHK Bogor	14.243.380.000	13.899.864.036	97,59
5	BDLHK Pematangsiantar	11.353.440.000	11.049.931.504	97,33
6	BDLHK Samarinda	11.603.050.000	11.602.682.789	100,00

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi Tahun 2020	
			Rupiah	%
7	BDLHK Makassar	14.637.800.000	13.967.542.849	95,42
8	BDLHK Pekanbaru	13.120.300.000	13.113.779.474	99,95
9	BDLHK Kadipaten	13.650.840.000	13.206.325.627	96,74
10	BDLHK Kupang	12.986.785.000	12.482.243.740	96,11
11	SMKK N Manokwari	12.650.000.000	12.174.135.902	96,24
12	SMKK N Kadipaten	15.025.000.000	14.849.098.694	98,83
13	SMKK N Makassar	14.053.000.000	13.871.192.863	98,71
14	SMKK N Samarinda	15.513.000.000	15.214.377.358	98,08
15	SMKK N Pekanbaru	26.846.650.000	16.589.278.269	61,79

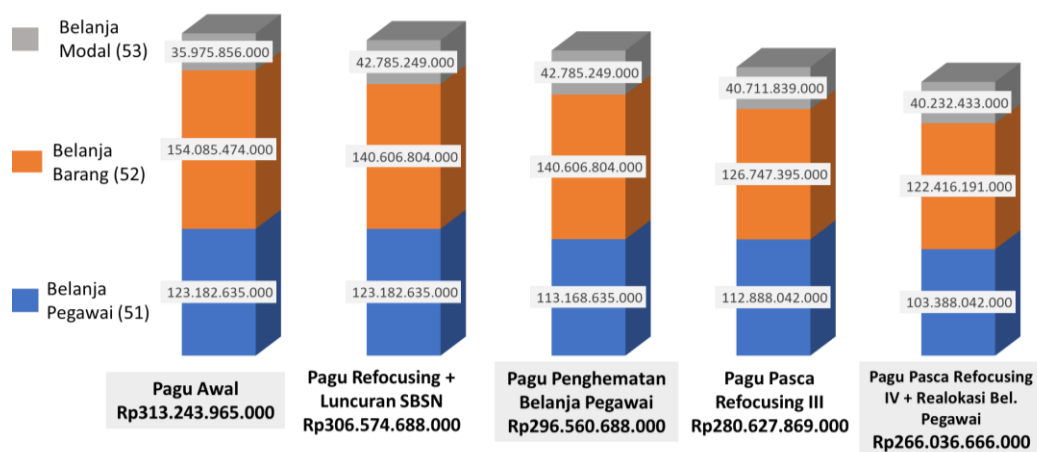
### 2.2.2 Serapan Anggaran dan Prognosis Tahun 2021

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada awal tahun 2021 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp313.243.965.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen Rp196.148.655.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp8.519.500.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp108.575.810.000,-

Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp279.984.386.000,-; PNBPN sebesar Rp10.000.000.000,-; HLN sebesar Rp 7.957.579.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp15.302.000.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp123.182.635.000,-; belanja barang Operasional Rp43.670.195.000.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp146.391.135.000,-.

Selama pelaksanaan tahun 2021, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang masih terjadi dengan melakukan *refocusing* anggaran. Pada Tahun 2021 terdapat empat kali penyesuaian anggaran dalam rangka pemenuhan penanganan pandemi covid-19 sebagaimana gambar 5.



GAMBAR 5. POSTUR ANGGARAN BP2SDM TA 2021

Realisasi Badan P2SDM s.d 8 November 2021 sebesar Rp210.065.793.781 (78,96%) dengan rincian realisasi per jenis belanja dan per satuan kerja lingkup BP2SDM sebagaimana gambar 6 terlampir. Salah satu kendala realisasi BP2SDM yang masih 78% tersebut disebabkan capaian kegiatan yang bersumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) masih cukup rendah. Hal ini karena terdapat rencana diklat *forest ranger* yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui oleh lembaga donor.



Sumber : Progres Harian 8 November 2021

GAMBAR 6. REALISASI ANGGARAN PER BELANJA DAN SATKER BP2SDM TA 2021 S.D 8 NOVEMBER 2021

Sebagai tindak lanjut masih rendahnya capaian pada sumber dana HLH, akan dilakukan perubahan rencana kegiatan diklat pada sumber dana tersebut. Oleh sebab itu, walaupun sampai dengan November realisasi anggaran BP2SDM masih sekitar 78%, namun prognosis s.d Desember masih optimis terealisasi cukup tinggi dengan nilai prognosis 99,21%. Adapun rincian realisasi dan prognosis per satuan kerja lingkup BP2SDM seperti tabel 7 berikut.

TABEL 7. PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN BP2SDM TA 2021

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi Tahun 2021 s.d 8 November		Prognosis s.d. Desember
			Rupiah	%	%
	<b>Badan P2SDM</b>	<b>266.036.666.000</b>	<b>210.065.793.781</b>	<b>78,96%</b>	<b>99,21</b>
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	44.121.205.000	36.138.515.312	81,91%	99,80
<i>a</i>	<i>Sekretariat BP2SDM</i>	35.776.710.000	28.487.770.620	79,63%	99,80
<i>b</i>	<i>Pusat Penyuluhan</i>	5.469.500.000	5.090.867.363	93,08%	99,80
<i>c</i>	<i>Pusat Renbang SDM</i>	2.874.995.000	2.559.877.329	89,04%	99,80
2	Pusdiklat SDM LHK	34.097.168.000	25.322.481.093	74,27%	99,30
3	Puslatmas dan PGL	10.625.000.000	8.752.362.431	82,38%	100
4	BDLHK Bogor	11.870.000.000	10.013.044.704	84,36%	99,98
5	BDLHK Pematangsiantar	9.883.696.000	8.774.237.053	88,77%	100
6	BDLHK Samarinda	9.933.910.000	8.788.771.245	88,47%	99,99
7	BDLHK Makassar	11.234.312.000	9.094.557.984	80,95%	99,91
8	BDLHK Pekanbaru	11.451.272.000	10.064.377.619	87,89%	99,99
9	BDLHK Kadipaten	11.494.654.000	10.032.099.022	87,28%	99,98
10	BDLHK Kupang	10.517.626.000	9.054.008.790	86,08%	99,98
11	SMKK N Manokwari	13.002.000.000	9.944.625.730	76,49%	95,42
12	SMKK N Kadipaten	16.805.000.000	11.356.411.185	67,58%	96,83
13	SMKK N Makassar	15.913.000.000	10.309.508.685	64,79%	97,50
14	SMKK N Samarinda	14.460.000.000	10.271.954.632	71,04%	99,55
15	SMKK N Pekanbaru	40.627.823.000	32.148.838.296	79,13%	99,59

## III. RENCANA KERJA TAHUN 2022

### 3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Mengacu pada Rencana Strategis KLHK 2020-2024 terdapat empat pilar pembangunan LHK yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Badan P2SDM mendukung pencapaian sasaran strategis 4 melalui dukungan terhadap indikator kinerja utama KLHK yaitu “Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan”; “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK”; serta “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”

Pada tahun 2022, agenda pembangunan / prioritas nasional masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 7 prioritas nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 Prioritas Nasional, yaitu

1. PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Badan P2SDM pada Tahun 2022 mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu:

#### 1. PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pada Prioritas Nasional 1 ini, Badan P2SDM mendukung melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian output yaitu ***Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha***. Kegiatan ini merupakan kegiatan diklat atau pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang

langsung menangani tapak termasuk tenaga teknis bidang LHK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam orientasi industri dan pengembangan wirausaha.

Tabel 8. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG Mendukung Prioritas Nasional 1

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
<b>Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</b>	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan
<b>Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi</b>	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha

## 2. PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yang terbagi ke dalam dua program prioritas yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 9. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG Mendukung Prioritas Nasional 3

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
<b>Pengentasan Kemiskinan</b>	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang
<b>Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing</b>	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
			Pengadaan Peralatan Sekolah
			Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)
			Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah

### 3. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu “Lembaga pendidikan formal yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan” serta “Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan”. Kegiatan ini termasuk ke dalam Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kegiatan Prioritas Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta termasuk ke dalam Proyek Prioritas Nasional Peningkatan kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan masyarakat terhadap Lingkungan Hidup. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkat kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup.

Alokasi anggaran BP2SDM pada tahun 2022 yang khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian 3 PN dimaksud adalah sebesar Rp88.736.444.000,-. Secara rinci, dukungan alokasi anggaran Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2022 tercantum pada Tabel 10 berikut.

TABEL 10. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp)
1	PN1 - Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	4.250.000.000,-
2	PN3 - Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	83.286.444.000,-
3	PN6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.200.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>88.736.444.000,-</b>

### 3.2 PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

Pada Tahun 2022, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja KLHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program pada Kementerian LHK mulai Tahun 2022 mengalami restrukturisasi menjadi 5 (lima) program dan Badan P2SDM tetap masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan

- kehutanan. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Menuju Masyarakat yang Mandiri. Program ini diarahkan untuk Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
  3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK serta menyiapkan SDM LHK termasuk tenaga menengah kehutanan yang dapat langsung bekerja di bidang LHK, kelompok tani hutan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.



GAMBAR 7. PROGRAM KEMENTERIAN LHK

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 6 (enam) target indikator kinerja program sesuai dengan Tabel 11 berikut.



TABEL 11. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2022

<i>Sasaran Strategis KLHK</i>	<i>Indikator Kinerja Utama KLHK</i>	<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Program*</i>
<b>Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)</b>	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU-13)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (68 Poin)
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK (IKU-16)	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (2.700 Orang)
			Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (475 Orang)
			Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (230 Lembaga)
		Meningkatkan Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha menuju Masyarakat yang Mandiri	Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan (140 Kelompok Masyarakat)
			Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan (1.700 Orang)
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU-17)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (76 Poin)	

\* Keterangan:

1. IKP Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
2. IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
3. IKP Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.
4. IKP Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dihitung berdasarkan RO KTH Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang.

- **INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KHDTK / HUTAN DIKLAT**



Gambar 8. Danau di KHDTK Bukit Suligi (Pekanbaru)

KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Badan P2SDM yang memiliki fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan juga melakukan pengelolaan terhadap KHDTK hutan diklat.

KHDTK hutan diklat merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat selain untuk kegiatan praktek peserta diklat, namun juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktek siswa SMK Kehutanan dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Sejak tahun 2020, Badan P2SDM melakukan penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat. Penilaian pengelolaan KHDTK mengacu pada PermenLHK no.7 Tahun 2021. Indeks Pengelolaan KHDTK akan dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu Pemenuhan Peruntukan, Efektifitas Pengelolaan serta Kontribusi terhadap Pengelolaan Hutan.

- **JUMLAH SDM LHK YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA**

Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya dihitung berdasarkan kegiatan Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.

**Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM**

Dalam rangka memenuhi Sumber Daya Manusia bidang LHK yang kompeten, dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Kegiatan uji kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu : Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyuluh Kehutanan (PK), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Non ASN.

### **Pelatihan SDM Aparatur LHK, SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha**

Peningkatan kapasitas SDM bidang LHK dilakukan melalui diklat. Pelatihan Peningkatan kapasitas diberikan kepada SDM Aparatur LHK (ASN), pelatihan keterampilan bagi SDM Non Aparatur LHK atau SDM LHK di tingkat tapak maupun Masyarakat sekitar hutan. Selain itu dilakukan pelatihan vokasi bagi tenaga teknis bidang LHK, dimana jenis pelatihan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang usaha kehutanan.

- **JUMLAH LULUSAN SMK KEHUTANAN YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT**



Foto oleh Dita Haristyaningrum  
Gambar 9. Asrama di SMKKN Pekanbaru

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan yang handal dan profesional, BP2SDM menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu Jawa Barat (SMKKN Kadipaten), Kalimantan Timur (SMKKN Samarinda), Riau (SMKKN Pekanbaru), Sulawesi Selatan (SMKKN Makassar) dan Papua (SMKKN Manokwari). Lulusan SMK Kehutanan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pemerintah, tetapi juga di dunia usaha (BUMN, swasta).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan menggunakan pola *boarding school*, sehingga siswa mendapat pembinaan penuh dari sekolah selain aspek kemampuan teknis kehutanan, juga pembinaan mental dan disiplin. Melalui pelaksanaan pendidikan ini diharapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tangguh bekerja di lapangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMK Kehutanan dilakukan pengembangan metode ajar, pengembangan kurikulum, peningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, pengembangan profesi bagi guru SMK Kehutanan maupun penyusunan strategis dan sinergitas pengelolaan SMKKN.

- **JUMLAH LEMBAGA/ KOMUNITAS SERTA GENERASI PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam rangka membentuk generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, diperlukan peran aktif Lembaga masyarakat dan komunitas dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan nyata dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya Badan P2SDM dalam meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dilakukan melalui pembinaan gerakan masyarakat bela lingkungan (GEMILANG) untuk mendukung atau mewujudkan gerakan lembaga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan hidup dan kehutanan serta

masyarakat; dan Pembinaan atau fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah (GPBLHS) termasuk pemberian apresiasi serta publikasi pelaksanaan gerakan dan hasilnya.

- **JUMLAH KELEMBAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIKEMBANGKAN**

Jumlah kelembagaan kelompok masyarakat yang dikembangkan dihitung berdasarkan Rincian Output Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya) yang terbentuk dan berkembang.

#### **Fasilitasi Pembentukan KTH Mandiri**

Fasilitasi Pengembangan KTH Menuju KTH Mandiri melalui peningkatan kelas KTH dari Madya menjadi Utama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas KTH melalui pementapan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha sehingga dapat ekonomi KTH melalui usaha yang mantap dan berkelanjutan.

#### **Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS**

Lembaga pelatihan pemagangan usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat. Lembaga ini selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat dalam belajar jenis-jenis usaha bidang kehutanan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Tujuan pembentukan wanawiyata widyakarya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 10. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan KTH dan Wanawiyata Widyakarya (LP2UKS)

- **JUMLAH PENYULUH YANG DITINGKATKAN**

Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti temu teknis dan berbagai kegiatan pembinaan teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis adalah untuk memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditas dari budidaya hingga pemasaran hasil, serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi penyuluh kehutanan sehingga penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya. Peningkatan kapasitas penyuluh terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha kelompok yang didampingi.

- **NILAI SAKIP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpelayanan prima, diperlukan peningkatan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerja kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Selain evaluasi terhadap nilai SAKIP, dilakukan evaluasi terhadap level maturitas SPIP pada Badan P2SDM serta penyusunan laporan keuangan pada Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut arsitektur organisasi baru KLHK, terdapat Unit Kerja Eselon II di Badan P2SDM yang mengalami perubahan baik nama maupun tusinya yaitu Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan menjadi Pusat Pengembangan Generasi LHK. Sesuai dengan tugas dan fungsi terbaru pada Pusat Pengembangan Generasi LHK, maka tuisi pelatihan masyarakat sudah tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM untuk mencapai target sasaran dan IKP mengalami penyesuaian. Penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2022 dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
4. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya B P2SDM.

Penyusunan rencana kerja untuk tahun 2022 masih menggunakan kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran yang mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output (KRO) yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan resmi dan mengikuti pedoman penentuan rincian output (RO), kegiatan Badan P2SDM dijabarkan melalui 24 (dua puluh empat) rincian output kegiatan.

RO Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran seperti yang tercantum pada Tabel 13 berikut. Adapun rincian KRO dan RO kegiatan BP2SDM secara lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran dokumen.

TABEL 12. RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN LINGKUP BADAN P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>		
<b>1. Perencanaan dan Pengembangan SDM</b>	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten <b>IKK :</b> 1. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang) 2. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan) 3. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (900 orang)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (1 Layanan)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (1 Layanan)
<b>2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK</b>	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat <b>IKK : Nilai KHDTK yang Dikelola (68 Poin)</b>	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)
		Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (390 Orang)
	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan <b>IKK :</b> 1. Lulusan Diklat Aparatur LHK (390 Orang) 2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (750 Orang) 3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (660 Orang) 4. Lulusan Pendidikan Karya Siswa (10 Orang)	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (750 Orang)
		Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (660 Orang)
		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)
<b>3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan <b>IKK : Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (475 Orang)</b>	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (475 Orang)
		Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)
		Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (3 Unit)
		Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)

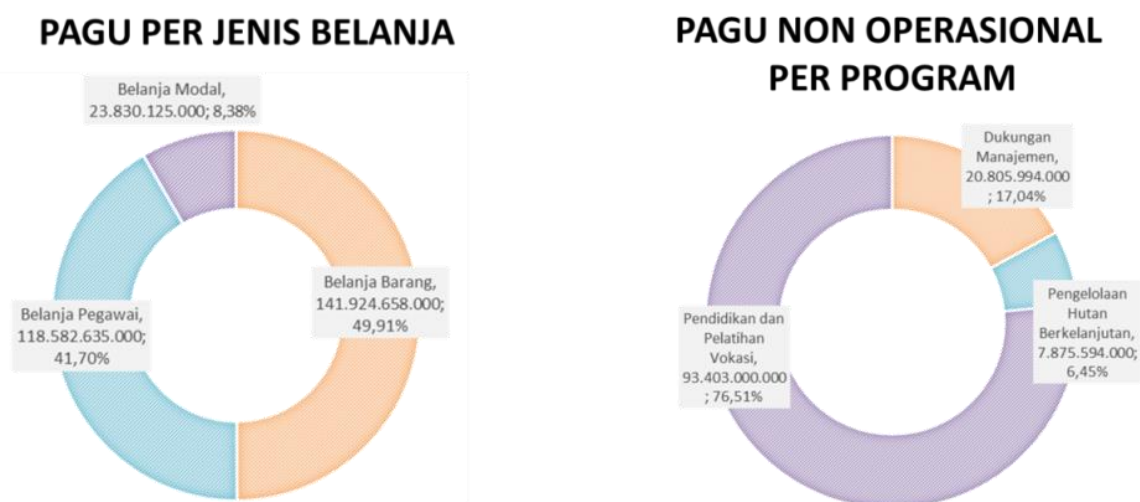
Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)
4. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Terwujudnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan <b>IKK</b> : Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya LHK (230 Lembaga)	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (215 Lembaga)
	2. Terbentuknya SDM yang berorientasi kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan <b>IKK</b> : Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (660 Orang)	Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (15 Lembaga)
		SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (660 Orang)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>		
5. Peningkatan Penyuluhan	1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat <b>IKK</b> :	KTH Mandiri yang terbentuk (90 Kelompok Masyarakat)
	1. Jumlah KTH (KTH Mandiri) (90 Unit) 2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit)	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang (50 Kelompok Masyarakat)
	2. Meningkatnya kapasitas Penyuluh <b>IKK</b> : Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.700 Orang)	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.700 Orang)
		Forest Investment Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project (FIP-II) (300 Orang)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM <b>IKK</b> :	Layanan Umum (12 Layanan)
	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (76 Poin)	Layanan Sarana Internal (6 Unit)
	2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3)	Layanan Prasarana Internal (5 Unit)
	3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)	Layanan Perkantoran (15 Layanan)

### 3.3 ALOKASI PENDANAAN BADAN P2SDM TAHUN 2022

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2022 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp284.337.418.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian (Gambar 10):

1. Program Dukungan Manajemen Rp183.058.824.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp7.875.594.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp93.403.000.000,-

Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp118.582.635.000,-; belanja barang Operasional Rp43.670.195.000.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp121.625.108.000,- (Gambar 10).



GAMBAR 11. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2022

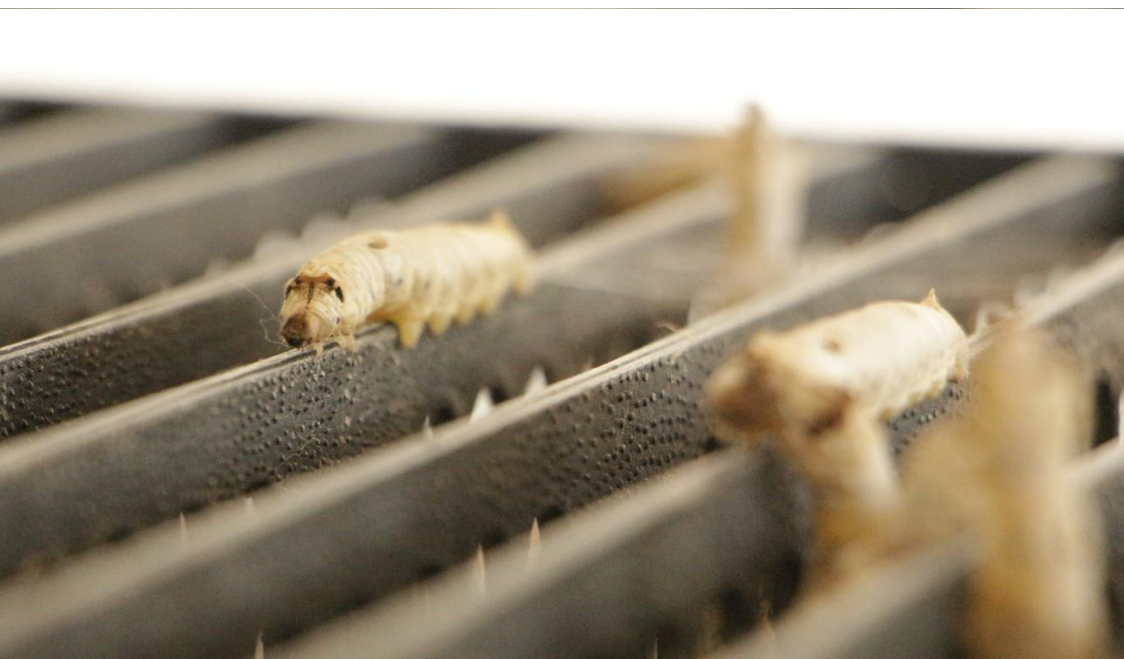
Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp263.375.099.000,-; PNP sebesar Rp11.850.169.000,-; HLN sebesar Rp589.150.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp8.523.000.000,-. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

TABEL 13. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribuan Rupiah)				TOTAL (Ribuan Rupiah)
		RM	PNP	HLN	SBSN	
<b>1. Unit Kerja Pusat</b>						
1	Kantor Pusat BP2SDM (Setbadan)	36.826.809	-	-	-	36.826.809
2	Kantor Pusat BP2SDM (Pusrenbang SDM)	4.200.000	-	-	-	4.200.000
3	Kantor Pusat BP2SDM (Pusat Penyuluhan)	12.537.155	6.670.169	-	-	19.207.324
4	Pusat Pengembangan Generasi LHK	12.451.307	270.000	-	-	12.721.307



No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribuan Rupiah)				TOTAL (Ribuan Rupiah)
		RM	PNP	HLN	SBSN	
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	23.456.900	1.690.000	589.150	-	25.736.050
<b>2. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>						
6	BDLHK Pematangsiantar	9.836.000	460.000	-	-	10.296.000
7	BDLHK Pekanbaru	10.947.300	460.000	-	-	11.407.300
8	BDLHK Bogor	10.940.583	460.000	-	-	11.400.583
9	BDLHK Kadipaten	11.332.200	460.000	-	-	11.792.200
10	BDLHK Samarinda	9.499.000	460.000	-	-	9.959.000
11	BDLHK Makassar	11.032.300	460.000	-	-	11.492.300
12	BDLHK Kupang	10.014.500	460.000	-	-	10.474.500
<b>3. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>						
13	SMKKN Pekanbaru	21.445.800	-	-	8.523.000	29.968.800
14	SMKKN Kadipaten	22.271.187	-	-	-	22.271.187
15	SMKKN Samarinda	19.093.690	-	-	-	19.093.690
16	SMKKN Makassar	21.236.150	-	-	-	21.236.150
17	SMKKN Manokwari	16.254.218	-	-	-	16.254.218
<b>TOTAL</b>		<b>263.375.099</b>	<b>11.850.169</b>	<b>589.150</b>	<b>8.523.000</b>	<b>284.337.418</b>



Komoditas KTH Bina Mandiri - Sukabumi  
Foto oleh Tim Dokumentasi dan Publikasi Sekretariat  
BP2SDM



## IV. PENUTUP

Badan P2SDM KLHK menyusun rencana kerja dan kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional. Sesuai dengan tupoksinya Badan P2SDM berfokus pada penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara tetapi juga SDM atau masyarakat yang bekerja/berperan dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan arsitektur kinerja baru di KLHK, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian/Lembaga diperlukan penyesuaian yang cepat oleh setiap satker Badan P2SDM agar tujuan pembangunan tetap dapat tercapai. Beberapa perubahan ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM LHK guna mendukung keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan walaupun di masa pandemi Covid-19. Dokumen perencanaan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan Badan P2SDM. Dokumen ini tentunya menjadi pedoman umum bagi Satker lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.

The background of the slide is a photograph of a boat on a body of water during sunset. The sun is low on the horizon, creating a bright, golden glow and lens flare effects. The boat's structure, including a canopy and a mast with a flag, is silhouetted against the bright sky. The water in the foreground is dark and calm.

# V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2022

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	1. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang)	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM	900 Orang	1.580.000	
		2. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Layanan	880.000	
		3. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan	1.240.000	
	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	1. Nilai KHDTK yang Dikelola (68 Poin)	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	3.000.000	Mitigasi Perubahan Iklim
		2. Lulusan Diklat Aparatur LHK (390 Orang)	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	390 Orang	1.753.000	Anggaran Responsif Gender
		3. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (750 Orang)	SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	750 Orang	2.250.000	Anggaran Responsif Gender; Adaptasi Perubahan Iklim
		4. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (660 Orang)		Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	660 Orang	2.000.000	Anggaran Responsif Gender
		5. Lulusan Pendidikan Karya Siswa (10 Orang)		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	1.500.000	
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
	6746- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (475 Orang)	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	475 Orang	54.894.875	Anggaran Pendidikan; Adaptasi Perubahan Iklim
			RAA-Sarana Bidang Pendidikan	Pengadaan Peralatan Sekolah	5 Paket	4.101.970	Anggaran Pendidikan
			RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	3 Unit	8.523.000	Anggaran Pendidikan
				Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4 Unit	8.480.155	Anggaran Pendidikan
	6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya LHK (230 Lembaga) 2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (660 Orang)	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	215 Lembaga	750.000	Adaptasi Perubahan Iklim
				Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	15 Lembaga	450.000	Adaptasi Perubahan Iklim
			BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	660	2.000.000	Anggaran Responsif Gender

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
<b>029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	5444-Peningkatan Penyuluhan	1. Jumlah KTH (KTH Mandiri) (90 Unit) 2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit) 3. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.700 Orang)	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	90 Kel. Masy.	2.100.000	Anggaran Responsif Gender
				Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	50 Kel. Masy	1.436.444	
			QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.700 Orang	3.750.000	Adaptasi Perubahan Iklim
			DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<i>Forest Investment Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project (FIP-II)</i>	300 Orang	589.150	Anggaran Responsif Gender
<b>029.WA-Program Dukungan Manajemen</b>	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (76 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3) 3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 dok)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	15 Layanan	162.252.830	
				Layanan Umum	12 Layanan	18.080.994	
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	6 Unit	1.701.600	
				Layanan Prasarana Internal	5 Unit	1.023.400	
<b>TOTAL</b>						<b>284.337.418</b>	



# ***TIM PENYUSUN***

## **RENCANA KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2022**

**Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 14,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.**

**Naskah dan tata letak disiapkan oleh Gun Gun Hidayat, Agus Setyawan,  
Dita Haristyaningrum, Rizky Dwi Harsanti, Anandita Irianti Utami,  
Azhuardi Rheza Fauzi dan Dede Rohman**

**Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

**Foto dari berbagai kondisi existing kegiatan  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**



**2022**

*Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia*